



Pemerintah Kabupaten Karanganyar

LKjIP 2025



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARANGANYAR**

Jln. Demak Komplek Perkantoran Cangkan Telp. (0271) 495038 Fax (0271) 494835
Website : kesbangpol.karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KATA PENGANTAR

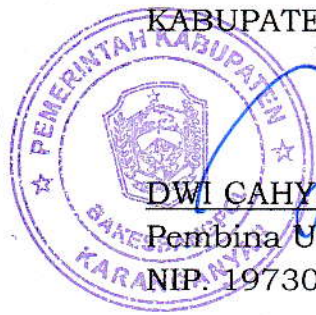
Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 disusun dengan maksud agar diperoleh gambaran mengenai tugas-tugas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran 2025. Laporan ini masih jauh dari kata sempurna sehingga kritik dan saran serta koreksi dalam rangka perbaikan dalam penyusunan dokumen ini sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 kami susun sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan tahun berikutnya.

Karanganyar, Januari 2026

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARANGANYAR



DWI CAHYONO, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 197306141993031002

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Isu Strategis	8
1.3 Dukungan SDM, Sarana Prasarana, dan Anggaran	8
1.4 Sistematika Penulisan	11
1.5 Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	12
1.6 Langkah Perbaikan Internal OPD	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja OPD	13
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	14
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025	15
2.4 Perjanjian Kinerja	18
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	23
3.2 Realisasi Anggaran	18
3.3 Inovasi	35
3.4 Penghargaan	35
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan Umum Capaian Kinerja	36
4.2 Rekomendasi	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pejabat Struktural	9
Tabel 1.2	Komposisi Jabatan Fungsional	9
Tabel 1.3	Pegawai Berdasarkan Golongan	10
Tabel 1.4	Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	10
Tabel 1.5	Sarana dan Prasarana	11
Tabel 1.6	Ringkasan Anggaran	11
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran Jangka Menengah	13
Tabel 2.2	Rencana Kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2025	14
Tabel 2.3	Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	14
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesbangpol Tahun 2025	19
Tabel 2.5	Rencana Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025	19
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kerja	23
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025	23
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2025	24
Tabel 3.4	Perbandingan Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023 - 2025	25
Tabel 3.5	Perbandingan Kinerja Sasaran Strategis Realisasi Tahun 2025 dan Target Akhir Renstra	25
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025	
Tabel 3.7	Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi Tahun 2025	27
Tabel 3.8	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Capaian Kinerja Tahun 2025	28
Tabel 3.9	Tabel Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program Tahun 2025	29
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran Tahun 2025	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar	3
-------------------	---	---

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebelumnya bernama Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, didirikan dengan visi untuk menciptakan persatuan, kerukunan, dan harmoni di antara semua elemen masyarakat Indonesia yang beragam. Kantor Kesbangpolinmas berperan dalam mengatasi masalah-masalah sosial, konflik antar etnis, dan perbedaan pendapat yang seringkali memicu ketegangan dan ketidakstabilan di dalam negeri.

Seiring berjalannya waktu, Kantor Kesbangpolinmas terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman. Pada tahun 1998, dalam rangka memperkuat peran politiknya, lembaga ini mengalami perubahan nomenklatur dan berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol). Perubahan ini bertujuan untuk menegaskan pentingnya peran politik dalam menjaga keutuhan negara dan merawat pluralitas masyarakat.

Badan Kesbangpol memiliki tugas yang lebih luas dan lebih fokus dalam membangun kesatuan dan harmoni dalam bingkai politik negara. Badan Kesbangpol bekerjasama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan elemen-elemen politik untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, menghargai perbedaan, dan mengedepankan dialog sebagai sarana penyelesaian konflik.

Badan Kesbangpol dibentuk sebagai unsur pelaksana pemerintah di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Latar belakang pembentukannya didasarkan pada kebutuhan untuk menjaga stabilitas politik, meningkatkan kesadaran persatuan, dan mengelola keberagaman di bawah landasan ideologi Pancasila.

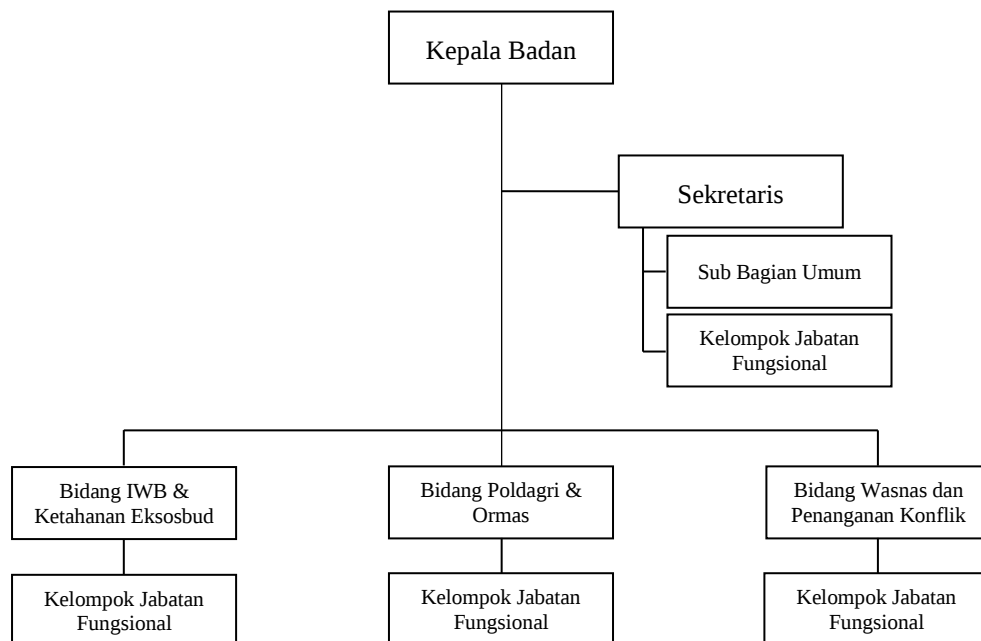
Sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Sedangkan fungsinya adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis pada bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan pada bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan

- pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi pada bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota;
 - f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan/kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar yang terbaru diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Badan;
- b) Sekretaris, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional;
- c) Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- e) Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.1

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Karanganyar

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 121 Tahun 2021 tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sampai dengan satu eselon di bawah kepala badan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pada bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan pada bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan, lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi pada bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan, lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi

kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan, lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan/kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Badan

Sekretaris Badan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan perumusan kebijakan pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi. Sekretaris dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian kegiatan;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan, dan kepegawaian;
- d. Pengoordinasian tata laksana;
- e. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang dan jasa;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

3. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerah;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah daerah; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas merumuskan pelaksanaan kebijakan pada bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di daerah;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, pengawasan

organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di daerah;

- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di daerah; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial mempunyai tugas perumusan pelaksanaan kebijakan bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, politik, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, politik, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, politik, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, politik, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, politik, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang

- asing, politik, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Isu Strategis

Untuk lebih memfokuskan strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar dalam pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien, diperlukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Organisasi Perangkat Daerah, dalam hal ini permasalahan dalam bidang kesatuan bangsa dan politik.

Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 – 2029, permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka ditetapkan isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terkait dengan tugas pokok dan fungsi adalah :

- 1) Peningkatan potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) terhadap kondusivitas wilayah;
- 2) Kecenderungan peningkatan potensi konflik sosial yang didasari oleh suku, agama, ras, dan antar golongan;
- 3) Kian merebaknya paham radikalisme dan terorisme. Di Kabupaten Karanganyar sendiri teridentifikasi warga (ex napiter) yang terlibat dalam aksi terorisme dan radikalisme;
- 4) Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- 5) Melemahnya pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan;
- 6) Demokrasi prosedural yang berkembang luas membatasi anggapan bahwa kehidupan demokrasi hanya sebatas pada momen penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.

1.3 Dukungan SDM, Sarana Prasarana, dan Anggaran

a. Dukungan Sumber Daya Manusia (SMD)

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh organisasi perangkat daerah, karena kinerja para pegawai menentukan tingkat kinerja organisasi perangkat daerah tersebut. Sampai dengan akhir tahun 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar memiliki sumber daya manusia sebanyak 35 orang, dengan kualifikasi berdasarkan pendidikan, golongan dan jabatan.

1) Pejabat Struktural

Jabatan struktural di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar terdiri dari 4 jabatan administrator (eselon III) dan 2 jabatan administrasi pengawas

(eselon IV). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Pejabat Struktural

No.	Jabatan	Jumlah	Terisi
1.	Pimpinan Tinggi Pratama	1	0
2.	Administrator	4	4
3.	Pengawas	1	1
	Total	6	5

Sumber : Badan Kesbangpol, 2025

2) Komposisi Jabatan Fungsional

Jumlah personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar yang menempati jabatan fungsional berjumlah 26 orang. Jumlah ini terdiri dari 20 orang sebagai fungsional umum dan 6 orang sebagai fungsional tertentu. Formasi jabatan fungsional di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2
Komposisi Jabatan Fungsional

No.	Nama Jabatan	Jumlah
1.	Jabatan Fungsional Umum	20
2.	Jabatan Fungsional Tertentu	6
	- Analis Kebijakan Ahli Muda	4
	- Perencana Ahli Pertama	1
	- Pranata Komputer	1
	Total	26

Sumber : Badan Kesbangpol, 2025

3) Pegawai Berdasarkan Golongan

Pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar terdiri atas pegawai yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu) dan pegawai yang berstatus sebagai Tenaga Harian Lepas (THL). Pegawai ASN berjumlah 31 orang, yang terdiri dari 17 orang PNS, 2 orang PPPK, dan 12 orang PPPK Paruh Waktu, serta pegawai yang berstatus THL sebanyak 4 orang. Formasi kepegawaian berdasarkan golongan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini :

Tabel 1.3

Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Nama Jabatan	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	17
	- Golongan IV	6
	- Golongan III	10
	- Golongan II	1
	- Golongan I	0
2.	PPPK	2
3.	PPPK Paruh Waktu	12
4.	THL	4
	Total	35

Sumber : Badan Kesbangpol, 2025

4) Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini :

Tabel 1.4

Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	PNS	PPPK	PPPK PW	THL
1.	SD				
2.	SMP Sederajat				
3.	SMA Sederajat	1	1	6	2
4.	D3		1		
5.	S1	16			2
6.	S2	6			
7.	Tidak Lulus Sekolah				
	Total	23	2	6	4

*Sumber : Badan Kesbangpol, 2025***b. Dukungan Sarana dan Prasarana**

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa bangunan gedung kantor, kendaraan dinas dan fasilitas lainnya yang menjadi barang inventaris. Sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar adalah seperti pada tabel berikut :

Tabel 1.5
Sarana dan Prasarana

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi
1.	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	m ²	1.700	Baik
2.	Kendaraan Roda Empat	Unit	5	Baik
3.	Kendaraan Roda Dua	Unit	11	Baik
4.	Komputer (Laptop/PC)	Unit	18	Baik
5.	Printer	Unit	11	Baik
6.	Mesin Ketik	Unit	3	Baik
7.	Mesin Pendingin Udara	Unit	15	Baik
8.	Meja Rapat	Unit	15	Baik
9.	Meja Kerja	Unit	30	Baik
10.	Kursi	Unit	90	Baik
11.	Lemari Kayu	Unit	5	Baik
12.	Lemari Kabinet	Unit	9	Baik

Sumber : Badan Kesbangpol, 2025

c. Dukungan Anggaran

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 didukung dengan anggaran dari APBD Kabupaten Karanganyar sebesar Rp 15.581.530.727,-.

Sedangkan Ringkasan DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 1.6
Ringkasan Anggaran

Uraian			Anggaran
1.	Belanja Operasi		15.526.460.727
		Belanja Gaji	2.993.646.227
		Belanja Barang / Jasa	3.527.695.500
		Belanja Hibah	9.005.119.000
2.	Belanja Modal		55.070.000
		Belanja Peralatan dan Mesin Lainnya	55.070.000
	Total APBD		15.581.530.727

Sumber : Badan Kesbangpol, 2025

1.4 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Isu Strategis
- 1.3 Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran
- 1.4 Sistematika Penulisan
- 1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2024
- 1.6 Langkah Perbaikan Internal OPD

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
- 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan
- 2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
- 2.4 Perjanjian Kinerja
- 2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran
- 3.3 Inovasi
- 3.4 Penghargaan

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Rekomendasi

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2024

No.	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Meninjau ulang target kinerja tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyesuaikan target RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029.	Telah disesuaikan dengan target kinerja RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029.

1.6 Langkah Perbaikan Internal OPD

Berdasarkan rekomendasi dari Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar telah menindaklanjuti dengan memastikan dan menyesuaikan target kinerja dengan cara mengevaluasi dokumen perencanaan yang telah disusun, dan menyesuaikan dengan target yang tercatat dalam dokumen tersebut, jika realisasi sebelumnya melebihi target tahun berjalan, maka target tahun berjalan disesuaikan dengan realisasi sebelumnya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja OPD

Rencana Strategis (Renstra) sangat diperlukan oleh masing-masing Perangkat Daerah, yang mana rencana strategis tersebut akan membantu Kepala Perangkat Daerah dan seluruh jajarannya dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga Organisasi Perangkat Daerah dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan lingkungan. Di samping itu, rencana strategis akan memperjelas konsep Organisasi Perangkat Daerah dalam melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara integral komprehensif.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, review dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut potensi, peluang, dan kendala yang ada. Perencanaan strategis harus disusun secara integral komprehensif dan implementatif sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026.

Perwujudan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran Jangka Menengah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target pada tahun		
			2024	2025	2026
Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	72	73	75
	Meningkatkan kondusivitas wilayah	Jumlah kasus konflik SARA (tidak ada kasus)	0	0	0

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target pada tahun		
			2024	2025	2026
	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	73,00	74,50	76,00

Sumber : Renstra Badan Kesbangpol Kab. Karanganyar 2024-2026

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Rencana Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar terkait dengan prioritas daerah dapat dijabarkan seperti tabel berikut :

Tabel 2.2

Rencana Kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025		
					Renstra	Renja	Renja Perub.
1.	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	73	73	73
		Meningkatkan kondusivitas wilayah	Jumlah kasus konflik SARA (tidak ada kasus)	Kasus	0	0	0
		Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	74,50	74,50	74,50

Sumber : Renstra Badan Kesbangpol Kab. Karanganyar 2024-2026

Rencana Kinerja terkait sasaran strategis Meningkatkan kondusivitas wilayah dan Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan, target yang ditetapkan tidak mengalami perubahan dari yang ditetapkan di Renstra, diperbaharui melalui Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 dan diperbaharui kembali di Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025.

Hubungan antara Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar terkait dengan program unggulan yang menjadi prioritas daerah dapat dijabarkan seperti tabel berikut :

Tabel 2.3

Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kondusivitas wilayah.	Jumlah kasus konflik SARA (tidak ada kasus)	Peningkatan pemahaman ideologi Pancasila, wasbang, dan bela negara.	Meningkatkan peran pemerintah, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan, dalam bela negara.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Peningkatan kerukunan antar umat beragama dan pemberantasan narkoba.	Meningkatkan peran pemerintah, aparat penegak hukum, forum kerukunan umat beragama, dan pemangku kepentingan.
		Peningkatan kualitas dinamika politik di daerah.	Meningkatkan peran serta partai politik dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan
		Peningkatan kualitas organisasi kemasyarakatan di daerah.	Meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.
		Peningkatan kewaspadaan dan deteksi dini potensi konflik sosial di daerah.	Meningkatkan peran serta aparat penegak hukum, forum kewaspadaan dini daerah dalam menangkal ATHG.
Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan.	Nilai SAKIP	Peningkatan kemampuan aparatur sipil sesuai kompetensi yang dibutuhkan.	Mengadakan pelatihan-pelatihan sesuai kebutuhan dan kompetensi aparatur sipil.

Sumber : Renstra Badan Kesbangpol Kab. Karanganyar 2024-2026

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Guna mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar, upaya pencapaiannya dilaksanakan melalui program sebagai berikut :

A. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
 - b. Pembentukan Paskibraka.

B. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
 - a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;

- b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
- C. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
 - 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
 - b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
- D. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
 - 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- E. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
 - 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 - a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
 - b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
 - c. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

F. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
 - h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Pemeliharaan Mebel;
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - d. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 telah ditetapkan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Perjanjian Kinerja ini merupakan perjanjian kinerja antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah sebagai wujud komitmen dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan ukuran keberhasilan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai pendukung dalam mencapai visi misi daerah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 mengacu pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Perjanjian Kinerja di Tahun 2025 mengalami perubahan format maupun target kinerja, dikarenakan ada capaian kinerja tahun 2024 yang telah melampaui target kinerja di tahun 2025. Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.4**Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesbangpol Tahun 2025**

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	73
1.1	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	74,50
1.2	Meningkatkan kondusivitas wilayah	Jumlah kasus konflik SARA (tidak ada kasus)	0

Sumber : Badan Kesbangpol Kab. Karanganyar, 2025

Pada tahun 2025 tidak ada perubahan Perjanjian Kinerja karena target yang ditetapkan masih sama. Adanya Perjanjian Kinerja Perubahan karena ada pergantian Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan.

Berikut ini rencana anggaran program dan kegiatan Tahun 2025 yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar :

Tabel 2.5**Rencana Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp.)
1	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	70	800.000.000
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kejadian perkelahian pelajar dan warga yang terjadi di Kabupaten Karanganyar selama 1 (satu) tahun	9 Kejadian	800.000.000
2	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks Kebebasan Sipil (IKS)	70	1.810.319.000
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Persentase partisipasi pemilih pada Pemilu / Pemilukada	0%	1.810.319.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp.)
	Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Indeks Kinerja Ormas (IKO)	53	6.308.750.000
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas Aktif	38%	6.308.750.000
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	62	150.000.000
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)	5 Kejadian	150.000.000
5	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Karanganyar selama 1 (satu) tahun	82%	700.000.000
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah kejadian unjuk rasa yang bersifat kekerasan / anarkis	4 Kejadian	700.000.000
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	91%	4.221.513.727
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 Dokumen	50.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan	91%	2.993.646.227

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp.)
		Perangkat Daerah		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	91%	280.297.500
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	91%	288.323.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah	91%	31.155.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang	91%	246.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	91%	332.092.000
Total				13.990.582.727

Sumber : Renstra Badan Kesbangpol Kab. Karanganyar 2025-2029

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam rangka mendukung penerapan SAKIP di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar, terdapat instrumen berupa aplikasi yang memudahkan pencatatan maupun perhitungan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar, instrumen tersebut antara lain :

1. SIPD Kemendagri (sipd.kemendagri.go.id)
Merupakan aplikasi Pemerintah Pusat yang dalam hal ini dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan, penatausahaan keuangan, usulan pembangunan daerah, dan lain sebagainya.
2. SmartSAKIP (smartsakip.karanganyarkab.go.id)
Merupakan aplikasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagai sarana pemantauan, pengendalian, dan evaluasi oleh Kepala Daerah terhadap kinerja perangkat daerah.
3. UPALEKA (upaleka.karanganyarkab.go.id)
Merupakan aplikasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagai sarana pembuatan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) Tahunan Perangkat Daerah.

4. ESKM (eskm.karanganyarkab.go.id)
Merupakan aplikasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagai sarana masyarakat memberikan penilaian kepuasan terhadap pelayanan Organisasi Perangkat Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan kinerja tahun ke-2 dan terakhir pada periode Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 99,23% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis.

Penilaian capaian kinerja setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk outcome, berdasarkan PermenPANRB No. 22 Tahun 2024. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kerja

Skala Nilai	Kategori Penilaian
>100%	Istimewa
>85% – 100%	Baik
>60% – 85%	Butuh Perbaikan
>20% – 60%	Kurang
>20%	Sangat Kurang

Berikut uraian capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir Renstra (2026)
			Tgt.	Real.	%	
Tujuan : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	86	85,58	99,51	75
Sasaran 1 : Meningkatkan kondusivitas wilayah	Jumlah kasus konflik SARA	Kasus	0	0	100	0

Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	74,50	73,35*	98,45	76,00
Rerata Sasaran Strategis					99,23	

Keterangan : (*) Capaian Tahun 2024

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, dari dua Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang capaiannya sama dengan target yang ditetapkan yaitu “Jumlah kasus konflik SARA” dan 1 indikator kinerja yang belum mencapai / di bawah target yang ditetapkan.

3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Analisis capaian kinerja pada bagian ini adalah membandingkan target indikator sasaran strategis organisasi dengan realisasinya, pada tahun 2025, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3

Pengukuran Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025			Kategori	Sumber Daya
		Tgt.	Real.	%		
Tujuan : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	86	85,58	99,51	Baik	Kemen PANRB
Sasaran 1 : Meningkatkan kondusivitas wilayah	Jumlah kasus konflik SARA	0	0	100	Baik	Badan Kesbangpol
Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	74,50	73,35*	98,45	Baik	LHE Inspektorat

Keterangan : (*) Capaian Tahun 2024

Terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang diampu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu “Jumlah kasus konflik SARA” dan “Nilai SAKIP” di mana keduanya termasuk kategori baik.

3.1.2 Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya

Analisis capaian kinerja pada bagian ini adalah membandingkan realisasi dan kinerja indikator sasaran strategis pada

tahun 2025 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya (2023-2024), sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023-2025

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
		Tgt.	Real.	%	Tgt.	Real.	%	Tgt.	Real.	%
Tujuan : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	80	70,91	88,64	72	85,74	119,08	86	85,58	99,51
Sasaran 1 : Meningkatkan kondusivitas wilayah	Jumlah kasus konflik SARA	0	0	100	0	0	100	0	0	100
Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	72,50	71,25	98,27	75,00	73,35	97,80	74,50	73,35*	98,45

Keterangan : (*) Capaian Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa realisasi kinerja sasaran tahun 2023-2025 yang mengalami peningkatan adalah “Nilai SAKIP”. Sedangkan “Jumlah kasus konflik SARA” tetap konsisten yang berarti pengendalian potensi konflik termasuk baik.

3.1.3 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah (Target Akhir Renstra)

Analisis capaian kinerja pada bagian ini adalah membandingkan realisasi dan kinerja indikator sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2025 dengan target akhir dalam Renstra. Analisis ini untuk mengetahui apakah target dalam rencana jangka menengah sudah tercapai atau belum, sehingga perlu kerja keras atau menjadi prioritas tidak di tahun berikutnya. Hasil analisis sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Kinerja Sasaran Strategis Realisasi Tahun 2025 dan Target Akhir Renstra

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir	Tingkat Kemajuan (%)
Tujuan : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	85,58	75	114,11

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir	Tingkat Kemajuan (%)
Sasaran 1 : Meningkatkan kondusivitas wilayah	Jumlah kasus konflik SARA	0	0	100
Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	73,35*	74,50	101

Keterangan : (*) Capaian Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, capaian kinerja sasaran strategis tahun 2025 untuk “Nilai SAKIP” sudah melebihi target, sedangkan untuk “Jumlah kasus konflik SARA” tetap konsisten.

3.1.4 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan capaian kinerja Provinsi Jawa Tengah

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi OPD / Kabupaten	Realisasi Provinsi
1	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	85,58	91,28
1.1	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	73,35*	82,63
1.2	Meningkatkan kondusivitas wilayah	Jumlah kasus konflik SARA (tidak ada kasus)	0	N/A

Keterangan : (*) Capaian Tahun 2024

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.7

Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi
1.	Meningkatkan kondusivitas wilayah	Jumlah kasus konflik SARA	0 Kasus	0 Kasus	100	Hubungan yang harmonis antara perangkat daerah dengan para mitra kerja, dalam hal ini seperti Polres, Kodim, Partai Politik, Ormas, serta para <i>stakeholder</i> dalam menjaga kondusivitas wilayah.	Meningkatkan kualitas komunikasi dan koordinasi sehingga tercipta hubungan yang baik dalam menjaga wilayah masing-masing.
2.	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	74,50	73,35*	98,45	Pada dasarnya sudah baik, meskipun tidak sempurna. Hal ini dicapai dengan adanya koordinasi dan komunikasi yang baik di internal perangkat daerah. Serta adanya tanggap cepat jika ada sesuatu hal yang kurang baik.	Monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala.

Keterangan : (*) Capaian Tahun 2024

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pencapaian sasaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.8

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Capaian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Kinerja				APBD			Tingkat Efisiensi
		Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatkan kondusivitas wilayah	Jumlah kasus konflik SARA	0 Kasus	0 Kasus	100%	11.114.000.000	10.832.768.939	94%	102,59%
2.	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	74,50	73,35*	98,45%	4.467.530.727	3.630.437.984	92%	123,05%

Keterangan : (*) Capaian Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2025 telah melaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian tujuan. 2 (dua) sasaran strategis dapat mencapai efisiensi lebih dari seratus persen ($\geq 100\%$).

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tabel berikut :

Tabel 3.9

Tabel Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator	Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1.	Meningkatkan kondusivitas wilayah	Jumlah kasus konflik SARA	100%	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Indeks Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	97,97%	Menunjang
				Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Indeks Kebebasan Sipil (IKS)	97,97%	Menunjang
				Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Indeks Kinerja Ormas (IKO)	89,28%	Menunjang
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	113,28%	Menunjang
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Karanganyar selama 1 (satu) tahun	100%	Menunjang
2.	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	98,45%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	101,08%	Menunjang

3.2 REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini dibahas mengenai realisasi anggaran, khususnya pada penghitungan antara pagu anggaran pada APBD Tahun 2025 dengan realisasi anggaran pada Tahun 2025.

Pada Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 13.990.582.727,- dan mengalami perubahan anggaran menjadi Rp 15.581.530.727,-. Dana anggaran tersebut digunakan untuk belanja operasi (terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa), belanja modal, dan belanja hibah.

Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 dana yang terealisasi sebesar Rp 14.463.206.923,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.118.323.804,-. Capaian kinerja keuangan untuk tahun 2025 mencapai 92,82%, yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Tahun 2025

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	4.467.530.727	3.630.437.984	81,26
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	42.968.000	41.880.200	97,47
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.968.000	41.880.200	97,47
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	2.993.646.227	2.339.837.480	78,16
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.993.646.227	2.339.837.480	78,16
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	590.317.500	581.666.500	98,53
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	6.740.000	6.740.000	100
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	583.577.500	574.926.500	98,52
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	241.657.000	187.252.727	77,49
	Penyediaan Komponen Instalasi	9.329.750	9.232.500	98,96

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.300.400	18.711.050	96,95
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.781.850	9.650.400	61,15
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.760.000	690.000	25
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	32.860.000	31.111.000	94,68
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	146.565.000	103.157.777	70,38
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.360.000	6.000.000	94,34
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8.700.000	8.700.000	100
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>55.070.000</i>	<i>47.145.000</i>	<i>85,61</i>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.070.000	47.145.000	85,61
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>246.000.000</i>	<i>192.107.142</i>	<i>78,09</i>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.000.000	53.387.142	74,15
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	174.000.000	138.720.000	79,72
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>297.872.000</i>	<i>240.548.935</i>	<i>80,75</i>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	210.702.000	175.561.657	83,32
	Pemeliharaan Mebel	1.750.000	1.700.000	97,14
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.420.000	22.270.000	87,61

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	10.000.000	9.750.000	97,50
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	31.267.278	62,53
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	750.000.000	718.922.239	95,86
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	<i>750.000.000</i>	<i>527.605.814</i>	<i>95,86</i>
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	250.000.000	239.682.950	95,87
	Pembentukan Paskibraka	500.000.000	479.239.289	95,85
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.940.000.000	1.921.503.100	99,05
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>	<i>1.940.000.000</i>	<i>1.921.503.100</i>	<i>99,05</i>
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	1.875.000.000	1.872.648.750	99,87

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	65.000.000	48.854.350	75,16
4.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	7.324.000.000	7.125.100.650	97,28
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	<i>7.324.000.000</i>	<i>7.125.100.650</i>	<i>97,28</i>
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	7.314.000.000	7.115.719.800	97,29
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	10.000.000	9.380.850	93,80
5.	Program Pembinaan Dan Pengembangan	150.000.000	142.732.600	95,15

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya			
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	150.000.000	142.732.600	95,15
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150.000.000	142.732.600	95,15
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	950.000.000	924.510.350	97,32
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	950.000.000	924.510.350	97,32
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	398.100.000	388.101.700	97,49
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi	494.700.000	487.158.650	98,47

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	57.200.000	49.250.000	86,10

3.3 INOVASI

Tidak ada.

3.4 PENGHARGAAN

Tidak ada.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan Umum Capaian Kinerja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai jabaran Renstra untuk menuju visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang secara bertahap diwujudkan dalam misi melalui program kerja tahun 2025. Program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar terdiri dari 6 (enam) program, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana, dan sarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori Baik. Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Pencapaian sasaran strategis "Meningkatkan kondusivitas wilayah" terlaksana 100% (Kategori Baik);
- b. Pencapaian sasaran strategis "Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan" terlaksana 98,45% (Kategori Baik).

4.2 Rekomendasi

Langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka menjaga konsistensi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Tetap meningkatkan kompetensi dan kualifikasi staf dengan mengikuti bintek, diklat, dan pelatihan serta memudahkan pemberian rekomendasi bagi yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;

2. Arah kebijakan anggaran tetap harus difokuskan dan diprioritaskan pada pencapaian sasaran dan pelaksanaan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Menjaga koordinasi dan komunikasi yang baik dengan para Mitra Kerja dan *stakeholder* agar selaras dalam penyelenggaraan *good governance*.